

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menjadi salah satu krisis kesehatan terbesar yang pernah dihadapi Provinsi Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi tantangan serius dalam pengendalian penyebaran virus, mulai dari tingginya mobilitas penduduk, kepadatan kawasan perkotaan, hingga kesenjangan akses layanan kesehatan di berbagai daerah. Sejak kasus pertama diumumkan di Indonesia pada Maret 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Jawa Barat terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2021 ketika varian Delta menyebar secara masif.<sup>1</sup>

Pada tahun 2020, Jawa Barat mencatat ribuan kasus konfirmasi dengan angka kematian yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pasien yang terinfeksi. Keterbatasan fasilitas kesehatan, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Covid-19, serta belum tersedianya vaksin menjadi faktor yang menyebabkan tingginya risiko kematian pada fase awal pandemi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah pusat kemudian menerapkan berbagai kebijakan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan, serta kampanye protokol kesehatan untuk menekan laju penyebaran virus.<sup>2</sup>

Memasuki tahun 2021, situasi pandemi mengalami eskalasi yang sangat signifikan. Munculnya varian Delta menyebabkan lonjakan kasus harian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak rumah sakit mengalami keterisian tempat tidur di atas kapasitas normal, sementara kebutuhan oksigen medis meningkat drastis. Pada periode ini angka kematian Covid-19 di Jawa Barat mencapai titik tertinggi selama pandemi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah

---

<sup>1</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2023). *Pikobar Jabar: Laporan Penanganan Covid-19 Jawa Barat Tahun 2020–2023*. Bandung: Pemprov Jawa Barat.

<sup>2</sup> Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2023). *Laporan Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia Tahun 2020–2023*. Jakarta: Satgas Covid-19 Nasional.

untuk mempercepat program vaksinasi nasional yang dimulai pada Januari 2021. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis), untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi. Keterlibatan organisasi keagamaan menjadi penting karena masih terdapat keraguan masyarakat mengenai aspek kehalalan dan keamanan vaksin.<sup>3</sup>

Pada tahun 2022, angka kasus dan kematian mulai menunjukkan tren penurunan. Meskipun terjadi gelombang Omicron pada awal tahun, tingkat fatalitas relatif lebih rendah dibandingkan varian Delta. Tingginya cakupan vaksinasi dosis pertama, kedua, dan booster terbukti mampu mengurangi risiko gejala berat dan kematian akibat Covid-19. Selain itu, kapasitas pelayanan kesehatan yang semakin baik turut mendukung keberhasilan penanganan pandemi di Jawa Barat.

Memasuki tahun 2023, kondisi pandemi semakin terkendali. Pemerintah Indonesia secara resmi mencabut status pandemi dan mengubahnya menjadi penyakit endemik. Jumlah kasus baru maupun angka kematian mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama dalam mendukung pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini, organisasi Islam memiliki kontribusi penting dalam membangun legitimasi sosial dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2023). *Pikobar Jabar: Laporan Penanganan Covid-19 Jawa Barat Tahun 2020–2023*. Bandung: Pemprov Jawa Barat.

<sup>4</sup> Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2023). *Laporan Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia Tahun 2020–2023*. Jakarta: Satgas Covid-19 Nasional.

**Tabel 1.1 Perkembangan Kasus dan Angka Kematian Covid-19 di Jawa Barat Tahun 2020–2023**

<b>Tahun</b>	<b>Kasus Terkonfirmasi Kumulatif</b>	<b>Meninggal Dunia Kumulatif</b>	<b>Keterangan</b>
2020	83.579	1.183	Awal pandemi, belum tersedia vaksin
2021	708.964	14.622	Puncak gelombang Delta
2022	1.239.783	15.937	Gelombang Omicron, fatalitas menurun
2023	1.271.531	16.023	Masa transisi menuju endemi

**Sumber:** Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023); Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (2023); Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2023).

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa peningkatan angka kematian tertinggi terjadi pada tahun 2021 ketika Jawa Barat menghadapi gelombang varian Delta. Dari total 14.622 kematian hingga akhir tahun 2021, sebagian besar terjadi pada periode Juni hingga Agustus 2021 yang merupakan masa krisis kesehatan paling berat selama pandemi. Setelah program vaksinasi berjalan secara masif, angka kematian mengalami perlambatan yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Data tersebut menunjukkan adanya korelasi antara peningkatan cakupan vaksinasi dengan menurunnya tingkat kematian akibat Covid-19.

Penurunan angka fatalitas setelah tahun 2021 menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan kesehatan publik yang diterapkan pemerintah. Selain faktor vaksinasi, keberhasilan tersebut juga didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, tersedianya fasilitas

pelayanan kesehatan yang lebih memadai, serta dukungan berbagai organisasi sosial-keagamaan yang aktif melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Dalam konteks Jawa Barat, organisasi Islam berperan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program vaksinasi dan berbagai kebijakan penanganan pandemi. Dengan demikian, keberhasilan pengendalian Covid-19 di Jawa Barat tidak hanya merupakan hasil intervensi pemerintah, tetapi juga buah dari kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam menghadapi krisis kesehatan yang berskala global.<sup>5</sup>

Pandemi Covid-19 yang mulai melanda Indonesia sejak awal 2020 telah memunculkan tantangan multidimensional, terutama di bidang kesehatan dan sosial. Pemerintah pusat dan daerah mengambil berbagai strategi, termasuk pembatasan aktivitas, protokol kesehatan, dan vaksinasi massal sebagai cara pemutus mata rantai penyebaran virus. Di tengah upaya negara tersebut, peran organisasi keagamaan, khususnya organisasi Islam arus utama seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis), menjadi sangat penting karena mereka memiliki pengaruh moral, jaringan sosial, serta legitimasi keagamaan masyarakat Muslim Indonesia.

Salah satu isu yang sangat central dalam proses vaksinasi adalah kehalalan dan keamanan vaksin. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa yang menetapkan bahwa vaksin Covid-19 jenis Sinovac suci dan halal setelah mendapat izin penggunaan darurat (*Emergency Use Authorization*, EUA) dari BPOM.<sup>6</sup> Demikian pula, pada Maret 2021, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin AstraZeneca, yang membolehkan penggunaan vaksin tersebut dalam kondisi darurat serta dengan syarat keamanan yang dijamin.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2023). *Laporan Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia Tahun 2020–2023*. Jakarta: Satgas Covid-19 Nasional.

<sup>6</sup>[https://www.kemenag.go.id/nasional/bpom-terbitkan-eua-komisi-fatwa-mui-vaksin-sinovac-halal-dan-boleh-digunakan-v5i3s0?utm\\_source](https://www.kemenag.go.id/nasional/bpom-terbitkan-eua-komisi-fatwa-mui-vaksin-sinovac-halal-dan-boleh-digunakan-v5i3s0?utm_source) diakses 5 November 2025.

<sup>7</sup>[https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/fatwa-mui-bolehkan-vaksinasi-astrazeneka-jubir-covid-19-dr-nadia-tekanan-masyarakat-jangan-ragu-vaksinasi?utm\\_source](https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/fatwa-mui-bolehkan-vaksinasi-astrazeneka-jubir-covid-19-dr-nadia-tekanan-masyarakat-jangan-ragu-vaksinasi?utm_source) diakses 5 November 2025.

Respon dari organisasi Islam tersebut tidak semata fatwa, tapi meluas ke aktivitas edukasi, sosialisasi, kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga medis, serta langsung ikut dalam pelaksanaan vaksinasi massal melalui fasilitas kesehatan milik ormas. Muhammadiyah sebagai contoh membentuk Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) yang aktif dalam sosialisasi dan layanan vaksinasi.<sup>8</sup> Mereka juga mengeluarkan pernyataan resmi mendukung pelaksanaan program vaksinasi selama standar keamanan dan kehalalan terpenuhi.<sup>9</sup> Selain itu, Muhammadiyah juga terlibat dalam kerja sama dengan polisi dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan vaksinasi massal.<sup>10</sup>

Di sisi lain, organisasi Persis juga menunjukkan aksi nyata: menyelenggarakan vaksinasi massal di pesantren (PPI 45 Rahayu), mengeluarkan surat edaran internal terkait ibadah selama pandemi, serta memberikan edukasi bahwa vaksin bukan sesuatu yang perlu ditakuti.<sup>11</sup> Dengan demikian, ketiga ormas ini berperan tidak hanya sebagai pemberi legitimasi agama (melalui fatwa dan pernyataan keagamaan), tetapi juga sebagai agen pelaksanaan dalam masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dan keraguan masyarakat terhadap sejumlah aspek vaksinasi. Misalnya, keraguan soal kehalalan, keamanan, efek samping, serta ketidakjelasan informasi. Respon tersebut mengindikasikan bahwa fatwa saja belum cukup diperlukan juga edukasi yang efektif, transparansi, serta kepercayaan publik agar vaksinasi dapat diterima secara luas.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah untuk menelusuri bagaimana organisasi Islam (NU, Muhammadiyah, Persis) merespon vaksin Covid-19 antara tahun 2020–2022 melalui fatwa, edukasi, dan implementasi. Metode penelitian sejarah cocok karena

---

<sup>8</sup>[https://jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/view/81?utm\\_source](https://jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/view/81?utm_source) diakses 5 November 2025.

<sup>9</sup>[https://muhammadiyah.or.id/2021/01/pernyataan-pp-muhammadiyah-tentang-pelaksanaan-program-vaksinasi/?utm\\_source](https://muhammadiyah.or.id/2021/01/pernyataan-pp-muhammadiyah-tentang-pelaksanaan-program-vaksinasi/?utm_source) diakses 5 November 2025.

<sup>10</sup>[https://jabar.antaranews.com/berita/296600/polri-gandeng-muhammadiyah-percepat-vaksinasi-covid-19-nasional?utm\\_source](https://jabar.antaranews.com/berita/296600/polri-gandeng-muhammadiyah-percepat-vaksinasi-covid-19-nasional?utm_source) diakses 5 November 2025.

<sup>11</sup>[https://persis.or.id/news/read/vaksinasi-massal-ppi-45-ketua-ug-vaksin-bukan-hal-yang-mesti-ditakuti?utm\\_source](https://persis.or.id/news/read/vaksinasi-massal-ppi-45-ketua-ug-vaksin-bukan-hal-yang-mesti-ditakuti?utm_source) diakses 5 November 2025.

objek kajian mencakup peristiwa masa lalu (fatwa, pernyataan resmi, kegiatan vaksinasi) yang perlu dikaji dengan tahap heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (validasi sumber), interpretasi (analisis makna dan konteks), dan historiografi (penulisan narasi sejarah). Melalui dokumen fatwa, arsip resmi ormas (website resmi NU, Muhammadiyah, Persis), berita resmi lembaga pemerintah yang bekerjasama dengan ormas, serta artikel jurnal dan laporan akademik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi fatwa dan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh NU, Muhammadiyah, dan Persis terkait vaksin Covid-19;
2. Menganalisis strategi edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh ormas keagamaan tersebut;
3. Menelaah bagaimana ormas-ormas tersebut ikut dalam pelaksanaan vaksinasi dan pelibatan masyarakat;
4. Menilai dampak dari peran ormas ini terhadap penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi dan keberhasilan program vaksinasi nasional.

Dengan fokus temporer 2020–2022, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran sejarah respons keagamaan yang krusial dalam kondisi krisis kesehatan nasional, serta implikasinya terhadap hubungan antara negara dan masyarakat Islam dalam konteks kebijakan publik.

Selain itu, respons organisasi Islam terhadap vaksinasi Covid-19 tidak dapat dilepaskan dari konteks historis hubungan antara agama, negara, dan kesehatan publik di Indonesia. Sejak masa kemerdekaan, ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah memiliki tradisi panjang dalam penguatan kesehatan masyarakat melalui rumah sakit, klinik, dan lembaga kemanusiaan. Muhammadiyah, misalnya, sejak awal abad ke-20 telah membangun sistem kesehatan modern sebagai bagian dari gerakan pembaruan sosialnya.<sup>12</sup> Sementara itu, NU melalui jaringan pesantren dan lembaga sosialnya telah memainkan peran

---

<sup>12</sup> Nakamura, M. (2012). *The Crescent Arises Over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*. ISEAS.

penting dalam pendidikan kesehatan berbasis komunitas, terutama di wilayah pedesaan.<sup>13</sup> Dengan latar sejarah tersebut, keterlibatan keduanya dalam vaksinasi Covid-19 bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, tetapi bagian dari kesinambungan tradisi pelayanan sosial-keagamaan yang telah mengakar.

Dalam konteks pandemi, literatur akademik menunjukkan bahwa dukungan atau penolakan aktor keagamaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan. Penelitian Ali & Abdalla menegaskan bahwa legitimasi keagamaan merupakan faktor kunci yang mendorong masyarakat Muslim di berbagai negara untuk menerima vaksinasi.<sup>14</sup> Di Indonesia sendiri, studi Suryadinata memperlihatkan bahwa sikap ormas Islam dapat memperkuat atau melemahkan penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah, terutama jika kebijakan tersebut menyentuh aspek moral dan hukum syariah. Karena itu, peran aktif NU, Muhammadiyah, dan Persis menjadi variabel penting dalam keberhasilan program vaksinasi nasional.<sup>15</sup>

Berbagai penelitian lain juga menyoroti bahwa keberhasilan vaksinasi di masyarakat Muslim tidak hanya ditentukan oleh fatwa kehalalan, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi publik. Sebagai contoh, penelitian Djalante et al. dan Aminah menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama selama pandemi adalah misinformasi keagamaan yang tersebar melalui media sosial dan kelompok komunitas. Di sinilah strategi literasi kesehatan berbasis komunitas yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah melalui ceramah daring, webinar, serta kolaborasi dengan tenaga medis—menjadi sangat relevan. Persis pun menguatkan aspek ini melalui pendekatan pendidikan internal berbasis dalil dan penjelasan ilmiah kepada para santri serta jamaahnya.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Fealy, G., & Bush, R. (2021). *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. ISEAS

<sup>14</sup> Ali, S., & Abdalla, S. (2021). *Religious Perspectives on Vaccination and Public Health*. *Journal of Religion and Health*, 60(3), 1586–1597.

<sup>15</sup> Suryadinata, L. (2021). *State and Islamic Organizations in Indonesia's Pandemic Response*. *ISEAS Perspective*, 2021(62).

<sup>16</sup> Aminah, S. (2022). *Hoaks keagamaan dan penerimaan vaksin Covid-19*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 45–63 dan Djalante, R. et al. (2020). *Review and analysis of Indonesia's responses to COVID-19*. *Progress in Disaster Science*, 6, 100091.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah munculnya fenomena *vaccine hesitancy* atau keraguan terhadap vaksin. Keraguan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena global yang diidentifikasi oleh World Health Organization (WHO) sebagai salah satu ancaman bagi kesehatan masyarakat. Di Indonesia, tingkat penolakan vaksin pada awal pandemi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kekhawatiran terhadap keamanan vaksin, efektivitas vaksin, efek samping, isu kehalalan, serta maraknya informasi yang tidak akurat di media sosial. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah karena keberhasilan program vaksinasi sangat bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat.<sup>17</sup>

Survei nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), UNICEF, dan WHO pada September 2020 menunjukkan bahwa sekitar 64,8% responden bersedia menerima vaksin Covid-19 apabila tersedia. Namun demikian, sebanyak 27,6% responden menyatakan masih ragu-ragu, sedangkan 7,6% menyatakan menolak vaksin. Penolakan tersebut terutama disebabkan oleh kekhawatiran mengenai keamanan vaksin (30%), keraguan terhadap efektivitas vaksin (22%), serta pertimbangan kehalalan vaksin (13%).<sup>18</sup>

Pada tahun 2021, ketika program vaksinasi mulai dilaksanakan secara nasional, tingkat penolakan masyarakat secara bertahap mengalami penurunan. Berbagai kampanye edukasi kesehatan yang dilakukan pemerintah, tokoh agama, tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap vaksin. Di Jawa Barat, keterlibatan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis) menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi keagamaan terhadap vaksinasi. Organisasi-organisasi tersebut memberikan penjelasan mengenai fatwa kehalalan vaksin, pentingnya ikhtiar kesehatan dalam Islam, serta urgensi vaksinasi sebagai

---

<sup>17</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ITAGI, UNICEF, & WHO. (2020). *Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

<sup>18</sup> *ibid*

bentuk perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam.<sup>19</sup>

Memasuki tahun 2022, tingkat penolakan vaksin semakin menurun seiring meningkatnya cakupan vaksinasi nasional. Masyarakat mulai melihat secara langsung manfaat vaksin dalam mengurangi risiko gejala berat, rawat inap, dan kematian akibat Covid-19. Selain itu, keberhasilan pemerintah dalam menyediakan layanan vaksin secara luas hingga ke tingkat desa turut meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada fase ini, kelompok yang sebelumnya ragu mulai bersedia menerima vaksin setelah memperoleh informasi yang lebih memadai dari sumber yang dipercaya.

Pada tahun 2023, penolakan vaksin Covid-19 berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan masa awal pandemi. Program vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) tetap menghadapi sebagian kecil kelompok masyarakat yang masih ragu, namun secara umum penerimaan masyarakat terhadap vaksin sudah berada pada tingkat yang tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa edukasi kesehatan, komunikasi publik yang efektif, serta keterlibatan tokoh agama dan organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam mengurangi resistensi terhadap program vaksinasi.

**Tabel 1.2 Persentase Penolakan dan Keraguan terhadap Vaksin Covid-19 di Indonesia (2020–2023)**

Tahun	Bersedia Vaksin (%)	Ragu-ragu (%)	Menolak (%)	Keterangan
2020	64,8	27,6	7,6	Survei Kemenkes–ITAGI–UNICEF–WHO
2021	74,1	19,5	6,4	Awal program vaksinasi nasional

<sup>19</sup> World Health Organization Indonesia. (2020). *Joint Press Release: Survei Penerimaan Vaksin COVID-19*. Jakarta: WHO Indonesia.

2022	85,7	10,2	4,1	Pasca gelombang Delta dan Omicron
2023	91,3	5,8	2,9	Masa transisi menuju endemi

**Sumber:** Kementerian Kesehatan RI (2020), UNICEF (2020), WHO Indonesia (2020), berbagai survei penerimaan vaksin nasional 2021–2023.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa tingkat penolakan vaksin mengalami tren penurunan yang cukup signifikan selama periode 2020–2023. Pada tahun 2020, persentase penolakan mencapai 7,6%, sementara pada tahun 2023 menurun menjadi sekitar 2,9%. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan berbagai strategi komunikasi kesehatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat sipil. Kelompok yang sebelumnya menolak vaksin sebagian besar berubah menjadi kelompok penerima setelah memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai keamanan dan efektivitas vaksin.

Dalam konteks Jawa Barat, faktor keagamaan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan vaksin. Oleh karena itu, keterlibatan organisasi Islam menjadi sangat penting dalam menjawab keraguan masyarakat terkait isu halal-haram vaksin. Penelitian ini menunjukkan bahwa NU, Muhammadiyah, dan Persis berkontribusi dalam memberikan edukasi berbasis dalil keagamaan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi. Pendekatan tersebut terbukti efektif karena masyarakat cenderung menerima informasi kesehatan yang disampaikan oleh tokoh agama yang mereka percayai.

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, akses informasi, pengalaman pribadi terhadap Covid-19, serta kepercayaan kepada pemerintah merupakan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menerima atau menolak vaksin. Semakin tinggi tingkat literasi kesehatan masyarakat, semakin rendah kecenderungan untuk menolak vaksin.

Sebaliknya, paparan terhadap misinformasi dan teori konspirasi terbukti meningkatkan keraguan terhadap vaksinasi.<sup>20</sup>

Secara historis, perkembangan tingkat penerimaan vaksin dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap inovasi kesehatan dapat diatasi melalui komunikasi publik yang tepat, edukasi berbasis bukti ilmiah, serta pelibatan aktor sosial yang memiliki legitimasi kuat di masyarakat. Dalam kasus Jawa Barat, organisasi Islam tidak hanya berfungsi sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang membantu pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi Covid-19.

Secara empiris, kontribusi ormas Islam dapat dilihat dalam beberapa capaian penting, salah satunya meningkatnya penerimaan vaksinasi di kalangan Muslim sejak pertengahan 2021. Laporan Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa setelah keluarnya fatwa MUI dan kampanye edukasi ormas, tingkat kesediaan vaksinasi di kalangan Muslim meningkat signifikan.<sup>21</sup> Selain itu, kerja sama fasilitas kesehatan ormas dengan pemerintah juga menjadi bukti konkret kontribusi masyarakat sipil dalam menghadapi krisis nasional, sebagaimana dicatat oleh Hadi & Nurhadi dalam studi mereka mengenai sinergi pemerintah–komunitas selama pandemi.<sup>22</sup>

Dari perspektif historis, fenomena keterlibatan ormas Islam dalam vaksinasi Covid-19 dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika hubungan negara–agama yang terus berkembang. Respons positif maupun tantangan yang muncul memberikan gambaran bahwa kebijakan publik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial-keagamaan yang kuat. Dengan menelusuri perkembangan peran NU, Muhammadiyah, dan Persis selama 2020–2023 melalui pendekatan sejarah, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih

---

<sup>20</sup> Heriyanto, R. S., et al. (2021). "Psychological Factors Affecting COVID-19 Vaccine Acceptance in Indonesia." *Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery*, 57(177), 1–10.

<sup>21</sup> Lembaga Survei Indonesia. (2021). *Sikap Publik terhadap Vaksinasi Covid-19*. LSI.

<sup>22</sup> Hadi, S., & Nurhadi. (2022). *Kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam penanganan Covid-19*. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 133–150.

komprehensif tentang bagaimana legitimasi keagamaan, praktik sosial, dan kebijakan negara bersinggungan dalam menghadapi krisis kesehatan global.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, tentang Peran Organisasi Islam dalam Mendukung Keberhasilan Program Vaksinasi Covid-19 Di Jawa Barat (2020–2023). Ditemukan beberapa point penting yaitu *pertama*, peran Organisasi Islam (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam) sangat signifikan dalam menyukseskan vaksinasi covid 19. *Kedua*, fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh organisasi Islam tersebut sangat *urgent* bagi para anggota dan simpatisan. *Ketiga*, bukan hanya fatwa saja, namun organisasi Islam tersebut ikut serta untuk terjun langsung mengedukasi dan membantu percepatan vaksin covid 19 untuk para anggota dan simpatisan. Maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan berikut dalam rumusan masalah:

1. Bagaimana peran NU, Muhammadiyah, dan Persis dalam mendukung program vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat?
2. Bagaimana pendekatan dakwah dan edukasi kesehatan yang digunakan NU Muhammadiyah dan Persis dalam isu vaksinasi?

Rumusan masalah ini dirancang untuk memberikan arah yang tegas bagi jalannya penelitian agar tetap terfokus pada analisis perubahan struktural dan dampak kemanusiaan dari sebuah kebijakan ekonomi. Dengan menjawab kedua pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekonstruksi sejarah ekonomi yang komprehensif sekaligus memberikan wawasan baru mengenai peran aktif aktor lokal dalam sejarah global. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu sejarah ekonomi dan menjadi bahan refleksi dalam merancang strategi pengembangan ekonomi berbasis komoditas lokal di masa depan.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis peran NU, Muhammadiyah, dan Persis dalam mendukung program vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat.

2. Menganalisis pendekatan dakwah dan edukasi kesehatan yang digunakan NU Muhammadiyah dan Persis dalam isu vaksinasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah kajian sejarah peradaban Islam di Indonesia, khususnya pada aspek hubungan antara agama, otoritas keagamaan, dan kebijakan publik di masa kontemporer. Melalui pendekatan historis, penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis) menafsirkan nilai-nilai keagamaan dalam konteks krisis kesehatan global. Secara teoritis, penelitian ini memperluas konsep peran sosial-keagamaan organisasi Islam dari sekadar lembaga dakwah menjadi aktor historis yang turut berkontribusi dalam transformasi sosial dan kebijakan publik.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami bagaimana teori legitimasi sosial Max Weber tentang otoritas tradisional dan rasional dapat diterapkan pada konteks Islam Indonesia. Melalui analisis fatwa dan praktik edukatif, penelitian ini juga memperkuat teori bahwa agama memiliki fungsi adaptif terhadap perubahan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Talcott Parsons. Dengan demikian, manfaat teoritis utama penelitian ini ialah membangun pemahaman baru mengenai integrasi nilai keagamaan dan rasionalitas modern dalam membentuk respons sosial umat Islam terhadap pandemi.

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya teori mengenai dinamika peradaban Islam modern di Indonesia, di mana nilai-nilai keagamaan, kebijakan kesehatan, dan sejarah sosial saling berinteraksi membentuk praktik keagamaan yang kontekstual, progresif, dan historis relevan.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan kebijakan publik, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih sensitif terhadap nilai dan otoritas keagamaan masyarakat Muslim. Pemerintah dapat memahami bahwa kolaborasi dengan organisasi Islam besar seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis merupakan faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas program nasional, termasuk dalam konteks vaksinasi atau penanganan krisis di masa depan.

Bagi organisasi keagamaan, penelitian ini memberikan refleksi mendalam mengenai efektivitas peran dakwah, fatwa, dan edukasi sosial yang mereka lakukan. Penelitian ini dapat membantu organisasi Islam menilai kembali strategi komunikasi keagamaan mereka agar lebih adaptif terhadap situasi darurat publik tanpa kehilangan nilai-nilai teologisnya. Dengan kata lain, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk memperkuat sinergi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan global.

Selain itu, bagi masyarakat umum, penelitian ini menumbuhkan kesadaran bahwa agama tidak hanya berbicara mengenai aspek ritual, tetapi juga memiliki kontribusi besar terhadap kesehatan, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kemanusiaan. Secara praktis, penelitian ini memperlihatkan bagaimana nilai Islam tentang *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dapat diterapkan melalui kebijakan vaksinasi, menjadikan ajaran Islam relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern.

## **3. Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur dalam bidang Sejarah Peradaban Islam dengan menempatkan pandemi COVID-19 sebagai

peristiwa sejarah yang penting dalam perkembangan sosial-keagamaan di Indonesia abad ke-21. Penelitian ini membuka ruang baru bagi akademisi untuk mengkaji peran organisasi Islam bukan hanya sebagai lembaga dakwah, tetapi juga sebagai aktor historis yang aktif dalam transformasi sosial dan kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini menambah dimensi baru dalam studi sejarah Islam Indonesia yang biasanya berfokus pada pendidikan, politik, atau ekonomi, dengan memasukkan aspek kesehatan masyarakat dan kebijakan sosial.

Bagi mahasiswa dan peneliti, karya ini dapat menjadi referensi metodologis tentang bagaimana pendekatan sejarah sosial dan sejarah kontemporer dapat digunakan untuk meneliti isu keagamaan yang aktual. Penggunaan sumber data seperti dokumen fatwa, arsip organisasi, dan kebijakan pemerintah juga dapat menjadi contoh konkret penerapan metode penelitian sejarah di era modern.

Lebih jauh, penelitian ini mendorong akademisi untuk mengembangkan kajian interdisipliner antara sejarah Islam, sosiologi agama, dan studi kebijakan publik. Secara akademis, karya ini menunjukkan bahwa studi sejarah peradaban Islam tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang mengikuti dinamika global. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi acuan penting bagi pengembangan kurikulum, penulisan ilmiah, serta penguatan paradigma keilmuan Islam yang kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Kajian mengenai peran organisasi Islam dalam bidang kesehatan, khususnya pada masa pandemi COVID-19, telah menarik perhatian banyak peneliti baik dari disiplin ilmu agama, sosial, maupun kesehatan masyarakat. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis) memainkan peran penting dalam merespons pandemi melalui pendekatan keagamaan dan sosial yang khas. Dalam konteks sejarah peradaban Islam Indonesia, peran tersebut mencerminkan

kesinambungan antara nilai-nilai dakwah, fatwa, dan amal sosial yang telah mengakar sejak masa kolonial hingga masa modern.

Penelitian pertama oleh Hidayat dalam Jurnal Sosial dan Agama berjudul “*Otoritas Keagamaan dan Kebijakan Publik: Studi Respons Ormas Islam terhadap Pandemi COVID-19*” menemukan bahwa NU melalui Lembaga Bahtsul Masail (LBM) dan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) memainkan peran penting dalam membangun legitimasi religius terhadap kebijakan pemerintah. NU mengeluarkan fatwa dan panduan ibadah selama pandemi, termasuk dukungan terhadap program vaksinasi dengan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) sebagai dasar teologis.<sup>23</sup>

Penelitian ini menyoroti bahwa peran ulama dan kiai lokal dalam menyosialisasikan fatwa menjadi kunci keberhasilan penerimaan vaksinasi di kalangan masyarakat pedesaan. Hidayat menegaskan bahwa NU tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga fungsi sosial dan edukatif melalui kegiatan penyuluhan kesehatan berbasis pesantren. Hal ini memperlihatkan bagaimana sistem keagamaan tradisional mampu beradaptasi dengan kebijakan modern tanpa kehilangan otoritas moralnya.

Sejalan dengan itu, Mubarak dan Isnaini dalam Jurnal Lektur Keagamaan menunjukkan bahwa NU berhasil menyeimbangkan aspek spiritual dan medis dalam menghadapi pandemi. Melalui fatwa, edukasi, dan gerakan sosial, NU menegaskan bahwa vaksinasi merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan untuk melindungi diri dan masyarakat. Penelitian ini menegaskan relevansi teori fungsionalisme struktural Parsons bahwa lembaga keagamaan berfungsi menjaga keseimbangan sistem sosial melalui mekanisme adaptasi terhadap perubahan lingkungan.<sup>24</sup>

Penelitian kedua oleh Suryana dalam Jurnal Al-Maslahah berjudul “*Gerakan Muhammadiyah dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Indonesia*” menyoroti kiprah Muhammadiyah COVID-19 Command Center

---

<sup>23</sup> Hidayat, N. (2021). “*Otoritas Keagamaan dan Kebijakan Publik: Studi Respons Ormas Islam terhadap Pandemi COVID-19.*” Jurnal Sosial dan Agama, 13(2), 145–160.

<sup>24</sup> Mubarak, S., & Isnaini, R. (2022). “*Peran NU dalam Legitimasi Keagamaan terhadap Program Vaksinasi COVID-19.*” Jurnal Lektur Keagamaan, 20(2), 212–230.

(MCCC) sebagai lembaga koordinatif nasional yang menjalankan berbagai program, mulai dari edukasi, pelayanan medis, hingga vaksinasi massal. MCCC berperan sebagai jembatan antara sains dan agama, dengan menekankan bahwa vaksinasi adalah wujud nyata dari prinsip *tajdid* (pembaruan) dan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam konteks kesehatan publik.<sup>25</sup>

Suryana menemukan bahwa pendekatan Muhammadiyah bersifat rasional dan berbasis bukti ilmiah (*evidence-based religious response*). Hal ini sesuai dengan karakter gerakan Islam modernis yang menekankan rasionalitas dan ijtihad kontekstual. Muhammadiyah menggunakan berbagai kanal media, termasuk televisi, website, dan media sosial, untuk menyebarkan pesan vaksinasi dan protokol kesehatan, menunjukkan bentuk komunikasi kesehatan yang efektif dalam masyarakat modern.

Penelitian ketiga oleh Fatmawati dalam Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam menunjukkan bahwa MCCC mengintegrasikan nilai-nilai dakwah sosial dengan pendekatan medis. Melalui lebih dari 80 rumah sakit Muhammadiyah/Aisyiyah, program vaksinasi dilaksanakan dengan melibatkan tenaga kesehatan dan kader dakwah. Hasil penelitian ini memperkuat teori legitimasi sosial Weber, di mana otoritas keagamaan Muhammadiyah memberikan dasar moral bagi masyarakat untuk mempercayai kebijakan pemerintah dan dunia medis. Dengan demikian, legitimasi keagamaan menjadi sarana untuk menumbuhkan kepercayaan publik di tengah ketidakpastian sosial.<sup>26</sup>

Kajian keempat tentang Persatuan Islam (Persis) dilakukan oleh Muttaqin dalam Jurnal Studi Islam Kontemporer berjudul "*Fatwa, Legitimasi, dan Perubahan Sosial: Analisis Respons Keagamaan terhadap Program Vaksinasi*". Penelitian ini menjelaskan bahwa Persis melalui Dewan Hisbah secara aktif meneliti kehalalan vaksin, mengeluarkan fatwa yang mendukung vaksinasi, dan melakukan edukasi publik melalui kajian daring dan khutbah Jumat. Pendekatan Persis lebih normatif dan *fiqh-oriented*, namun tetap memperhatikan aspek medis

---

<sup>25</sup> Suryana, I. (2021). "Gerakan Muhammadiyah dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Indonesia." Jurnal Al-Maslahah, 11(2), 121–138.

<sup>26</sup> Fatmawati, N. (2022). "Peran Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) dalam Dakwah Sosial dan Kesehatan." Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, 12(1), 44–61

dan kemaslahatan umat.<sup>27</sup>

Muttaqin menemukan bahwa Dewan Hisbah Persis menekankan prinsip *dar'u al-mafâsid wa jalb al-mashâlih* (menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan) sebagai dasar hukum keagamaan untuk vaksinasi. Dengan demikian, penerimaan vaksin tidak hanya dilihat dari sisi kedokteran, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi maqasid al-syariah. Persis memadukan rasionalitas hukum Islam dan argumentasi ilmiah sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi darurat.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa peran fatwa Persis dalam legitimasi vaksinasi memperkuat posisi organisasi Islam sebagai *moral authority* dalam masyarakat Muslim urban, terutama di Jawa Barat. Dengan mengombinasikan prinsip keagamaan dan edukasi ilmiah, Persis berperan sebagai aktor historis yang mempraktikkan dakwah sosial modern.

Penelitian ketujuh oleh Rahman dalam bukunya *Agama dan Kesehatan Publik di Era Pandemi: Perspektif Islam Indonesia* menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan. Ia menemukan bahwa efektivitas vaksinasi di Indonesia meningkat pesat ketika fatwa MUI dan dukungan ormas besar diumumkan secara publik. Rahman menegaskan bahwa kolaborasi antara negara dan agama menciptakan legitimasi ganda rasionalitas ilmiah dan moralitas keagamaan yang memperkuat penerimaan kebijakan kesehatan.<sup>28</sup>

Dalam perspektif sejarah peradaban Islam, Rahman menyebut peristiwa ini sebagai “momentum rekontekstualisasi peran agama dalam kehidupan publik.” Artinya, agama tidak lagi hanya menjadi ranah spiritual, melainkan juga pilar sosial yang menjaga keberlangsungan hidup umat manusia (*hifz al-nafs*). Hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan vaksinasi di Indonesia bukan semata karena intervensi medis, tetapi karena dukungan kuat dari struktur sosial-keagamaan yang historis.

Dari berbagai hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran

---

<sup>27</sup> Muttaqin, Z. (2021). “Fatwa, Legitimasi, dan Perubahan Sosial: Analisis Respons Keagamaan terhadap Program Vaksinasi.” *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 9(1), 35–58.

<sup>28</sup> Rahman, F. (2022). *Agama dan Kesehatan Publik di Era Pandemi: Perspektif Islam Indonesia*. Bandung: Mizan

organisasi Islam dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 bersifat multidimensional: mencakup dimensi teologis (fatwa dan legitimasi), sosiologis (edukasi dan komunikasi kesehatan), serta praktis (implementasi dan pelayanan sosial). Setiap ormas memiliki karakteristik berbeda: NU menekankan otoritas ulama dan tradisi pesantren, Muhammadiyah menonjolkan rasionalitas dan aksi medis modern, sementara Persis mengutamakan argumentasi hukum Islam dan kemaslahatan umat.

Ketiganya menunjukkan pola yang sama dalam hal orientasi kemanusiaan dan kesadaran sosial. Temuan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa keberhasilan program vaksinasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara negara dan organisasi keagamaan. Secara akademik, hasil-hasil penelitian ini memperkuat gagasan bahwa Islam Indonesia bersifat adaptif, dinamis, dan memiliki daya lentur tinggi dalam menghadapi tantangan modernitas.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori, data empiris, dan konteks sosial-historis yang dikaji. Penelitian berjudul “Peran Organisasi Islam (NU, Muhammadiyah, Persis) dalam Menyukseskan Program Vaksinasi COVID-19 di Indonesia (2020–2023): Antara Fatwa, Edukasi, dan Implementasi” berangkat dari fenomena bagaimana lembaga-lembaga Islam memainkan peran signifikan dalam membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19 melalui legitimasi keagamaan, edukasi publik, serta aksi sosial. Dalam hal ini, organisasi Islam tidak hanya berfungsi sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berakar kuat dalam sejarah peradaban Islam Indonesia.

Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa global yang menantang keseimbangan sosial dan keagamaan masyarakat. Di Indonesia, penerimaan terhadap vaksinasi pada awalnya menghadapi hambatan berupa keraguan teologis dan informasi yang simpang siur di kalangan umat Islam. Melalui fatwa, edukasi, dan implementasi lapangan, NU, Muhammadiyah, dan Persis berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kerangka berpikir

penelitian ini menekankan pentingnya melihat peran organisasi Islam secara teoretis, historis, dan praktis.

Dengan menggunakan tiga lapisan teori fungsionalisme struktural (Talcott Parsons) sebagai *grand theory*, legitimasi sosial (Max Weber) sebagai *middle theory*, dan komunikasi kesehatan serta dakwah sosial (Rogers dan Aziz) sebagai *applied theory* penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa keberhasilan vaksinasi tidak hanya ditentukan oleh faktor medis, tetapi juga oleh kekuatan legitimasi keagamaan dan fungsi sosial lembaga Islam. Melalui pendekatan ini, kerangka berpikir membantu menelusuri bagaimana agama, kesehatan, dan sejarah sosial berpadu membentuk dinamika peradaban Islam Indonesia yang adaptif, modern, dan kontekstual dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19.

Sebagai dasar teoritis utama, penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan sosial (*social equilibrium*). Dalam konteks penelitian ini, organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang berfungsi menjaga stabilitas masyarakat di tengah krisis pandemi.<sup>29</sup>

Melalui lensa fungsionalisme struktural, fatwa dan keputusan keagamaan mengenai vaksinasi dapat dilihat sebagai mekanisme adaptasi nilai dan norma Islam terhadap situasi sosial baru. Proses edukasi dan implementasi vaksinasi yang dilakukan organisasi Islam menjadi fungsi integratif untuk memastikan masyarakat tetap patuh terhadap aturan kesehatan tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Dengan demikian, teori ini membantu menjelaskan bagaimana lembaga keagamaan memainkan peran stabilisator sosial di tengah disrupsi besar akibat pandemi COVID-19.

Sebagai teori menengah, digunakan teori legitimasi sosial dari Max Weber yang menjelaskan bahwa setiap otoritas atau kekuasaan memerlukan legitimasi agar dapat diterima dan diikuti oleh masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, legitimasi keagamaan menjadi unsur penting dalam keberhasilan program

---

<sup>29</sup> Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: Free Press.

vaksinasi.<sup>30</sup>

Fatwa halal dan keharusan vaksinasi dari lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Bahtsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Dewan Hisbah Persis berperan sebagai sarana legitimasi moral dan spiritual terhadap kebijakan negara. Legitimasi ini menjembatani jarak antara rasionalitas medis (kebijakan negara) dan rasionalitas keagamaan (ajaran Islam). Melalui pendekatan Weberian, penelitian ini berupaya memahami bagaimana otoritas keagamaan membangun kepercayaan publik, sehingga masyarakat merasa vaksinasi bukan hanya tindakan medis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab iman dan kemanusiaan.

Sebagai teori terapan, digunakan teori komunikasi kesehatan<sup>31</sup> dan teori dakwah sosial<sup>32</sup>. Komunikasi kesehatan menjelaskan bagaimana pesan kesehatan (dalam hal ini vaksinasi) dapat diterima oleh masyarakat apabila disampaikan oleh komunikator yang memiliki kredibilitas dan otoritas moral. Organisasi Islam memiliki posisi strategis sebagai komunikator efektif karena kedekatannya dengan basis umat dan kepercayaannya yang tinggi.

Sementara itu, teori dakwah sosial menekankan bahwa dakwah bukan hanya menyampaikan ajaran agama dalam bentuk ritual, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam bidang sosial, kesehatan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kegiatan edukasi vaksinasi yang dilakukan oleh NU, Muhammadiyah, dan Persis merupakan bentuk *dakwah bil-hal*, dakwah melalui tindakan nyata untuk kemaslahatan umat.

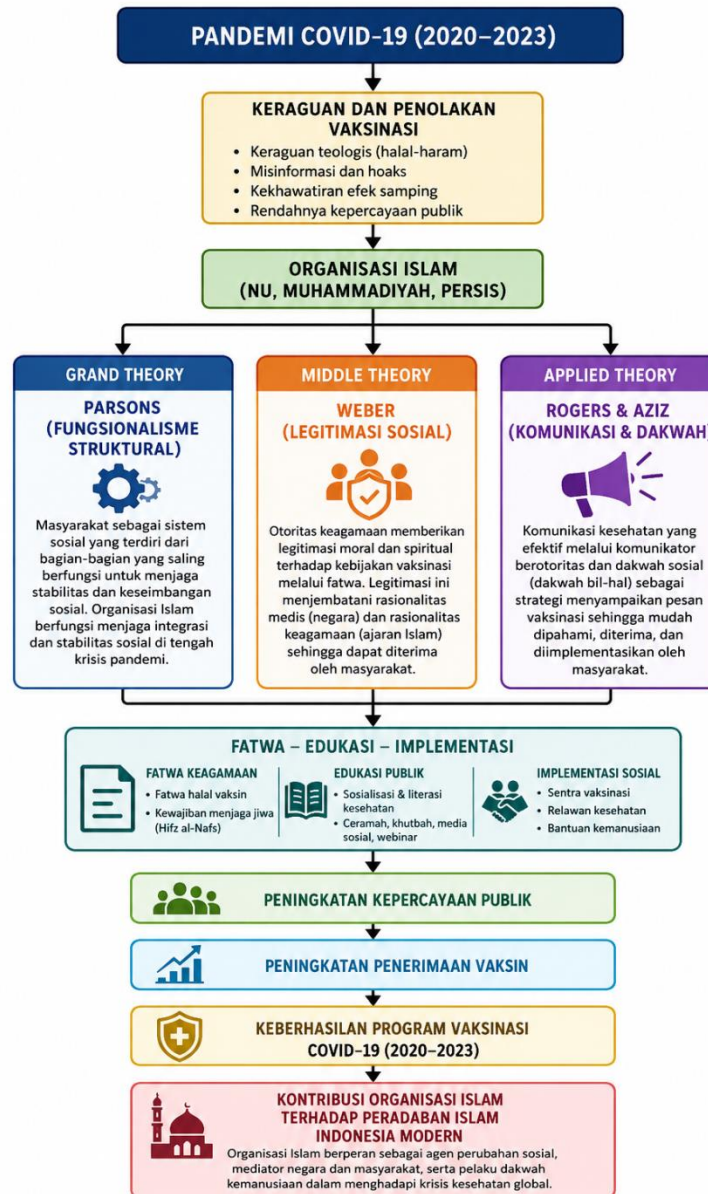
Dengan menggunakan teori terapan ini, penelitian dapat menganalisis secara konkret bagaimana strategi komunikasi dan dakwah yang dilakukan ketiga organisasi tersebut berpengaruh terhadap tingkat penerimaan vaksinasi di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Berikut ini penulis sajikan peta konsep:

---

<sup>30</sup> Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.

<sup>31</sup> Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press.

<sup>32</sup> Aziz, M. (2015). *Dakwah Sosial: Konsep dan Implementasi dalam Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



## G. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah cara kerja atau sebuah sistem untuk mencapai hasil dari sebuah penelitian. Fungsi metode adalah untuk mempermudah pelaksanaan sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sejarah. Pendekatan ini juga akan memudahkan dalam menganalisis proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, lalu dituliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh. Langkah-langkah dalam metode historis, meliputi:

- 1) Heuristik (pengumpulan sumber sejarah) – mencari dan mengumpulkan data atau dokumen yang relevan.
- 2) Kritik sumber – menilai keaslian (autentisitas) dan kredibilitas sumber.

- 3) Interpretasi – menafsirkan data untuk menemukan makna dan hubungan antarperistiwa.
- 4) Historiografi – menyusun hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang analitis dan argumentatif.

## 1. Heuristik

Langkah-langkah penelitian seorang sejarawan untuk mengumpulkan sumber-sumber atau bukti-bukti sejarah disebut dengan heuristik. Dalam pengertiannya, kata heuristik berasal dari bahasa Yunani, *heuriskein* yang artinya mencari atau menemukan. Dalam bahasa latin, heuristik dikenal sebagai *ars inveniendi* (seni mencari) atau juga sama dengan istilah *arts of intervention* dalam bahasa Inggris.<sup>33</sup>

Adapun metode yang digunakan lebih kepada gabungan antara pustaka (*library research*) dan lapangan (*field research*). Melalui metode ini, peneliti berusaha merekonstruksi secara analitis Peran Organisasi Islam dalam Mendukung Keberhasilan Program Vaksinasi Covid-19 Di Jawa Barat (2020–2023). Sumber data yang digunakan meliputi:

### a) Sumber Primer

- 1) Lembaga Bahtsul Masail PBNU. (2021). *Fatwa tentang Kehalalan dan Kewajiban Vaksinasi COVID-19*. Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- 2) Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2021). *Tafsir Fatwa Vaksinasi sebagai Upaya Hifz al-Nafs di Masa Pandemi*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- 3) Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis). (2021). *Fatwa No. 12/2021 tentang Hukum Vaksinasi COVID-19 dalam Islam*. Bandung: Pusat Dewan Hisbah Persis.

---

<sup>33</sup> A Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 51-52

- 4) Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2021). *Fatwa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin COVID-19 dari Sinovac*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI.
- 5) Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kerjasama Pemerintah dan Ormas Islam dalam Sosialisasi Vaksinasi COVID-19*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- 6) Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC). (2021). *Laporan Kegiatan Nasional Program Vaksinasi Muhammadiyah*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- 7) Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU). (2021). *Arsip Program "NU Peduli Sehat" dalam Penanganan COVID-19*. Jakarta: PBNU.
- 8) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Statistik Vaksinasi Nasional dan Partisipasi Organisasi Keagamaan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- 9) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2022). *Data Nasional Vaksinasi COVID-19 dan Peran Lembaga Masyarakat*. Jakarta: BNPB.
- 10) Pimpinan Pusat Aisyiyah. (2021). *Program Vaksinasi dan Penyuluhan Kesehatan Aisyiyah untuk Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: PP Aisyiyah.
- 11) Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. (2021). *Dokumen Rapat Koordinasi PWNU dan Satgas COVID-19*. Surabaya: PWNU Jatim.
- 12) Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. (2021). *Surat Edaran tentang Edukasi dan Legitimasi Vaksinasi bagi Umat Islam*. Bandung: MUI Jabar.
- 13) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2021). *Rilis Media: Kolaborasi Ormas Islam dalam Menangkal Hoaks Vaksinasi*. Jakarta: Kominfo RI.

- 14) Wawancara dengan Ustadz Bubun Farhabun, S.Pd, Bidang Pendidikan PW Persis Jawa Barat. (2026). Bandung.
- 15) Wawancara dengan dr. Agus Samsudin, Ketua MCCC Muhammadiyah. (2025). Yogyakarta.

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan kajian, analisis, dan interpretasi ilmiah terhadap peristiwa, data, atau dokumen yang menjadi objek penelitian.

- a) Hidayat, N. (2021). "*Otoritas Keagamaan dan Kebijakan Publik: Studi Respons Ormas Islam terhadap Pandemi COVID-19.*" *Jurnal Sosial dan Agama*, 13(2), 145–160.
- b) Suryana, I. (2021). "*Gerakan Muhammadiyah dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Indonesia.*" *Jurnal Al-Maslahah*, 11(2), 121–138.
- c) Muttaqin, Z. (2021). "*Fatwa, Legitimasi, dan Perubahan Sosial: Analisis Respons Keagamaan terhadap Program Vaksinasi.*" *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 9(1), 35–58.
- d) Fatmawati, N. (2022). "*Peran Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) dalam Dakwah Sosial dan Kesehatan.*" *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 12(1), 44–61.
- e) Mubarak, S., & Isnaini, R. (2022). "*Peran NU dalam Legitimasi Keagamaan terhadap Program Vaksinasi COVID-19.*" *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(2), 212–230.
- f) Rahman, F. (2022). *Agama dan Kesehatan Publik di Era Pandemi: Perspektif Islam Indonesia*. Bandung: Mizan.
- g) Husein, A., & Wahyudi, A. (2023). "*Lembaga Islam dan Kesehatan Publik di Indonesia: Tinjauan Historis.*" *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 15(1), 88–103.
- h) Aziz, M. (2015). *Dakwah Sosial: Konsep dan Implementasi dalam Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- i) Rohim, M. (2022). “Peran Fatwa dan Media Sosial dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Program Vaksinasi.” *Jurnal Komunikasi Islam*, 10(2), 77–92.
- j) Aly, A. (2021). “Agama, Sains, dan Krisis Kemanusiaan: Studi Respons Organisasi Keagamaan terhadap COVID-19.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Islam*, 8(1), 102–118.
- k) Hasan, N. (2023). *Islam, Authority, and Public Health: Religious Responses to the COVID-19 Pandemic in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.

## 2. Kritik Sumber

Setelah tahap heuristik rampung, peneliti sejarah memasuki fase verifikasi kritis untuk memastikan validitas epistemologis sumber yang terkumpul.<sup>34</sup> Proses ini, disebut kritik sejarah, bertujuan menguji *ontologi* sumber—apakah ia merepresentasikan fakta historis yang koheren atau sekadar konstruksi subjektif aktor sejarah.<sup>35</sup> Kritik dilakukan melalui dua pendekatan komplementer: kritik ekstern yang menganalisis aspek fisik sumber (keaslian material, teknik penanggalan, provenans),<sup>36</sup> dan kritik intern yang mengevaluasi kredibilitas konten melalui pembacaan hermeneutis terhadap bias, motif, dan konteks produksi teks.<sup>37</sup>

### a. Kritik Eksternal

Proses penelitian sejarah tidak hanya menitikberatkan pada analisis konten, melainkan juga memerlukan pemeriksaan mendetail terhadap karakteristik material sumber yang digunakan. Tahap evaluasi fisik atau yang dikenal sebagai kritik eksternal menjadi fondasi penting dalam metodologi sejarah, di mana peneliti wajib menguji keabsahan material sumber melalui parameter seperti usia

---

<sup>34</sup> Charles-Victor Langlois & Charles Seignobos, *Introduction to the Study of History* (London: Duckworth, 1898), hlm. 89.

<sup>35</sup> E.H. Carr, *What is History?* (London: Penguin, 1961), hlm. 16.

<sup>36</sup> Louis Gottschalk, *Loc.Cit.* hlm. 124-126.

<sup>37</sup> Marc Bloch, *Loc.Cit.* hlm. 101.

dokumen, medium penulisan, atau kondisi fisik artefak. Sebagai contoh, apabila sumber utama berbentuk manuskrip, verifikasi meliputi pengecekan teknik penanggalan karbon (*carbon dating*), analisis jenis kertas, atau identifikasi gaya paleografis yang sesuai dengan konteks temporal penelitian. Implementasi prosedur ini bertujuan memastikan koherensi kronologis antara sumber dan peristiwa yang dikaji, sekaligus mencegah kontaminasi data akibat penggunaan artefak yang tidak autentik atau berasal dari periode berbeda. Dengan demikian, kritik eksternal berfungsi sebagai filter ilmiah untuk meminimalisasi risiko interpretasi keliru yang bersumber dari ketidaksesuaian bukti material.

**b. Kritik Internal**

Analisis terhadap sumber sejarah tidak hanya berhenti pada aspek fisik, tetapi juga mencakup eksplorasi intensi kontekstual yang melekat pada dokumen atau artefak. Pada sumber tertulis, peneliti harus mengidentifikasi narasinya apakah bersifat politis (seperti manifesto), administratif (catatan sensus), atau personal (surat pribadi) guna memahami bias dan agenda pembuatnya. Sementara itu, artefak material seperti prasasti atau perkakas kuno memerlukan interpretasi melalui konteks fungsional, misalnya dengan menganalisis desain, teknologi pembuatan, atau pola penggunaan yang merefleksikan nilai budaya zamannya. Proses ini dikenal sebagai kritik intrinsik, di mana peneliti mengevaluasi makna simbolis, relasi kuasa, atau paradigma ideologis yang tersirat dalam sumber. Pentingnya tahap ini terletak pada kemampuannya mengungkap diskursus tersembunyi seperti propaganda penguasa dalam kronik kerajaan atau stereotip gender dalam literatur abad pertengahan sehingga peneliti dapat menghindari anakronisme atau reduksi makna. Tanpa kritik intrinsik, risiko misinterpretasi akan meningkat, seperti menganggap konsep "negara" dalam naskah abad ke-14 setara dengan definisi modern,

padahal konteks politik saat itu berbasis kesukaran, bukan *nation-state*.

### 3. Interpretasi

Sumber sejarah yang telah lolos dari tahapan kedua yaitu kritik sejarah intern maupun ekstern tentunya tidak dapat berbicara banyak mengenai sebuah kisah sejarah, bila tidak dibantu oleh peneliti sejarah melalui tahapan interpretasi. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat riskan, dimana dalam tahapan ini seorang peneliti sejarah bisa saja melakukan subjektifitas yang sangat tinggi dalam tahap interpretasi. Maka diharuskanlah para peneliti sejarah melakukan analisa yang sangat tajam dan mendalam untuk meminimalisir terjadinya sebuah subjektifitas dalam tahapan interpretasi.<sup>38</sup> Tahapan interpretasi juga sangat membantu untuk para peneliti sejarah untuk menuangkan kreatifitasnya dalam sebuah penelitian sejarah. Namun perlu diingat, dalam melakukan hal tersebut perlu analisa yang sangat tajam dan mendalam untuk meminimalisir terjadinya sebuah subjektifitas.

### 4. Historiografi

Tahapan terakhir dalam sebuah penelitian sejarah adalah tahapan penulisan atau biasa disebut historiografi. Historiografi merupakan sebuah tahapan penyusunan sebuah sumber sejarah menjadi sebuah fakta sejarah yang telah benar-benar tersaring melalui tahapan verifikasi atau sebuah kritik sejarah.<sup>39</sup> Fakta-fakta yang telah ditemukan oleh penulis kemudian dituliskan dengan apa yang berkaitan dengan *Peran Organisasi Islam dalam Menyukkseskan Program Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia (2020–2023): Antara Fatwa, Edukasi, Dan Implementasi*

---

<sup>38</sup> John Arnold, *Sejarah: Sebuah Pengantar Singkat*, Penerjemah: Auliaul Fitrah Samsuddin, Yogyakarta: Basabasi, 2021. hlm. 89

<sup>39</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2014. hlm. 147-150